


Prodi Administrasi Publik

JURNAL AGUNG F.pdf

 Agung F

 Fisip

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3179585175

Submission Date

Mar 11, 2025, 3:16 AM UTC

Download Date

Mar 11, 2025, 3:27 AM UTC

File Name

JURNAL_AGUNG_F.pdf

File Size

254.8 KB

14 Pages

5,773 Words

38,595 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 50 words)

Exclusions

- ▶ 3 Excluded Sources

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 4%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 20% Internet sources
- 4% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	unars	7%
2	Internet	
	ijppr.umsida.ac.id	5%
3	Internet	
	repository.uinjambi.ac.id	5%
4	Internet	
	library.binus.ac.id	2%
5	Internet	
	inforegulasi.blogspot.com	2%
6	Student papers	
	Universitas Terbuka	1%
7	Internet	
	es.scribd.com	1%
8	Internet	
	jurnal.unigal.ac.id	1%
9	Internet	
	www.coursehero.com	1%
10	Internet	
	repository.uksw.edu	<1%

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMER 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMP NEGERI 5 SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Agung Ferdiansyah^{1*)}, Nina Sa'idah Fitriyah²⁾, Usrotul Hasanah³⁾.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

*Email Aferdiansyah786@gmail.com

Abstrak

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program yang dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas,serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan. Program kartu Indonesia pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang kerap kali terjadi karena masih banyak siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sangat rentan terhadap terjadinya putus sekolah. Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan interaktif. Berdasarkan penelitian ini bahwa 1) Komunikasi dilihat dari proses penyampaian informasi terkait nama penerima bantuan PIP masih kurang efektif. Siswa yang tidak mengetahui namanya ada tersebut baru melakukan pencairan ketika mendekati proses pencairan berikutnya. Tetapi jika dilihat dari proses penyampaian informasi melalui sosialisasi tentang tujuan dan sasaran penggunaan dana PIP sudah berjalan dengan baik. 2) Sumber daya meliputi a. sumber daya manusia yang sudah berjalan dengan baik, b. sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan yang sudah tersedia dikarenakan PIP merupakan program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. 3) Disposisi terkait sudah berjalan dengan baik dilihat dari pihak pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal dengan memberikan informasi kepada orang tua dan siswa. 4) Struktur Birokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

Kata kunci : Implementasi, Program Indonesia Pintar

Abstract

Implementation concerns various activities directed at the realization of programs carried out with clear work procedures and techniques, and carried out together to achieve policy objectives. The Smart Indonesia Card program is a government program launched to overcome problems that often occur because there are still many students who come from underprivileged families and are very vulnerable to dropping out of school. This study is to describe the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Card at

SMP Negeri 5 Situbondo, Situbondo Regency. The research method used is Qualitative. Data collection is observation, interviews, documentation. Data analysis techniques use interactive. Based on this study, 1) Communication seen from the process of conveying information regarding the names of PIP assistance recipients is still ineffective. Students who do not know their names only make disbursements when approaching the next disbursement process. However, when viewed from the process of conveying information through socialization about the objectives and targets of the use of PIP funds, it has been going well. 2) Resources include a. human resources that are already running well, b. non-human resources in the form of financial resources that are already available because PIP is a program funded by the Central Government. 3) The related disposition has been running well as seen from the implementing party who provides maximum service and information by providing information to parents and students. 4) The bureaucratic structure has not been fully running well, which involves more than one bureaucratic structure, each party having different operational standards.

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Program

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek krusial pada pembangunan suatu wilayah, karena pendidikan menjadi pencipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap suatu kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap peserta didik agar dapat mengerti dan memahami serta membuat kritis dalam berpikir. Maka dari itu peran pendidikan sangat penting dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun martabat bangsa.

Selain dari itu pendidikan juga merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan ini Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang menuntut peningkatan mutu pendidikan. Rancangan visi dan misi harus relevan diadaptasi dengan perkembangan zaman yang ada dan dengan jenjang atau tahapan pendidikan formal. Pemerintah perlu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu "Memajukan Kesejahteraan Umum" serta "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Dalam pasal 1 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Dalam Bab VI Pasal 14 menyebutkan Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam Pasal 17 menerangkan Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat. Di dalam pasal 18 menjelaskan pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah

menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 19 menjelaskan, Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan karena kemiskinan menjauhkan masyarakat untuk menjangkaunya, kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya minat masyarakat dalam mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan disini berperan penting dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi yaitu dengan rendahnya kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang memiliki dampak pada rendahnya penghasilan sehingga menyulitkan untuk memperoleh pendidikan

Tetapi sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan diantaranya karena mahalnya biaya pendidikan. Angkaputus sekolah dan belum meratanya pendidikan juga masih menjadi perbincangan publik dan merupakan isu masalah pendidikan di Indonesia yang urgen. Faktor internal seperti kemauan anak untuk bersekolah atau kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya juga merupakan sebuah kendala namun yang menjadi pokok permasalahan adalah faktor external seperti biaya pendidikan. Status sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang rata-rata menengah ke bawah bahkan miskin, menjadi kendala utama atau penyebab anak putus sekolah. Sebagian besar orang tua terpaksa memberhentikan anak dari sekolahnya dengan pertimbangan biaya. Memang dapat disadari bahwa salah satu tantangan terbesar dari pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini ialah bagaimana layanan pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama oleh lapisan masyarakat yang memiliki kendala ekonomi.

7 Maka dari itu pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi. Perhatian tersebut antara lain ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran yang berarti serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usahameningkatkan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah terus melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada. Karena peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa setiap warganegara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Program WajibBelajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah akses pendidikan di Indonesia. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun menjadikan lulusan SMP semakin meningkat, sehingga pemerintah menambah daya tampung layanan pendidikan menengah (SMA dan SMK) untuk menampung para siswa memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3 Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan karena kemiskinan menjauhkan masyarakat untuk menjangkaunya, kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya minat masyarakat dalam mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan disini berperan penting dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi yaitu dengan rendahnya kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang memiliki dampak pada rendahnya penghasilan sehingga menyulitkan untuk memperoleh pendidikan.

Hak untuk memperoleh layanan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" dan pada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia". Di dalam undang-undang juga telah diatur tentang sistem pendidikan di Indonesia pada Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 "bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat".

8 Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar ialah merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya pernah ada yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program ini bertujuan guna meningkatkan akses pendidikan anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan dan ikut serta mencegah anak putus sekolah.

3 Kebijakan dari program kartu Indonesia pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang kerap kali terjadi karena masih banyak siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sangat rentan terhadap terjadinya putus sekolah. Hal ini disebabkan karena perekonomian keluarga yang tidak mampu serta kurang mendukung, sehingga anak tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah. Sumber dana dari program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Program ini merupakan program kerja sama dengan tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Agama (Kemenag).

5 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 10 Tahun 2020 PIP bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau, menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Situbondo yang memiliki siswa penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar adalah SMP Negeri 5 Situbondo. SMP Negeri 5 Situbondo terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Terdapat 128 siswa yang menerima bantuan program kartu

Indonesia pintar. Masing-masing siswa di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp. 750.000,00 untuk kelas VII dan VIII per semester dan ada juga yang menerima sebesar Rp. 375.000,00 persemester untuk kelas IX sesuai edaran Persesjen Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dana tersebut tujuannya di gunakan untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantara lain untuk membeli tas, buku alat tulis dan keperluan lainnya.

Siswa yang mendapatkan dana bantuan Pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar pada tahun 2021 melalui dua tahap pengusulan yang telah dilakukan sekolah yaitu sebanyak 110 siswa dengan kelas VII berjumlah 5 siswa, kelas VIII berjumlah 52 siswa, dan kelas IX hanya berjumlah 53 siswa. Sedangkan sisa dari 110 yang belum cair dalam penerimaan PIP yang berjumlah 18 siswa yang terbagi dua tahap pengusulan yang telah dilakukan sekolah yaitu pada tahun 2022 terdapat 9 siswa dari kelas VII berjumlah 4 siswa, kelas VIII berjumlah 5 siswa yang dicairkan pada 2022. Kemudian pada tahun 2023 dikhususkan untuk kelas IX sebanyak 9 siswa sehingga selama 3 tahun yang mendapat PIP berjumlah 128 melalui 3 tahapan pengajuan oleh pihak sekolah. PIP yang mencairkan pihak Bank yang langsung masuk ke rekening siswa dan sekolah hanya membantu pemrosesannya.

Namun yang terjadi adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga yang mampu terdaftar sebagai penerima dana PIP serta masih adanya siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima dana bantuan program PIP. Padahal yang seharusnya pemerintah meluncurkan program ini yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu supaya mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang sama. Fungsi dari dana program ini adalah pembelian buku serta alat tulis sekolah, pembelian seragam sekolah, perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, biaya transportasi ke sekolah, uang saku, dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.

Permasalahan lain yang terjadi dalam Program Kartu Indonesia Pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan hal ini terlihat dari masih rendahnya pengetahuan wali murid tentang peruntukkan bantuan PIP, dalam pemberian bantuan ini kurang tepat sasaran, terdapat penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana Program Kartu Indonesia Pintar oleh penerima bantuan program ini seperti contoh dana tersebut tidak gunakan untuk pentingan pendidikan masalah diperuntuk buat beli keperluan rumah tangga.

Terjadi kesulitan bagi pemerintah untuk mengawasi karena penyaluran bantuan dana tersebut langsung ke orang tua siswa dan orang tua siswalah yang mengelola, sehingga sekolah tidak mengetahui dengan jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja, pada saat wali murid tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik maka akan terjadi banyak penyalahgunaan dari dana tersebut untuk pribadi melainkan untuk kebutuhan pendidikan anak. Adanya kebijakan program kartu Indonesia pintar yang berasal dari pusat ini mendorong untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi program kartu Indonesia pintar di SMP Negeri 5 Situbondo. Uraian di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 5 Situbondo Kabupaten Situbondo".

METODE PENELITIAN

Rancangan Kegiatan

1 Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terstruktur guna mencapai tujuan tertentu dan pelaksanaannya disertai dengan pedoman yang ada. Dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan penelitian sangat penting diperhatikan karena dapat membantu peneliti dalam menentukan rumusan masalah. Oleh karena itu, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2020:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, (Saryono, 2020:49). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan karena subjek dalam penelitian yaitu tentang analisis program yang akan diuraikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif dimana fokus dari penelitiannya yaitu menggambarkan secara keseluruhan mengenai bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Metode kualitatif digunakan karena lebih mudah pelaksanaannya yang berkaitan langsung dengan kenyataan yang ada disekitar dan dapat menggambarkan secara langsung antara peneliti dengan responden yang memiliki hubungan satu sama lainnya. Menurut Sugiyono (2017:9) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu, dengan penggunaan metode kualitatif peneliti akan langsung mendeskripsikan tentang kondisi yang ada dengan bentuk kata-kata tertulis bahkan dokumentasi berbentuk foto. sumber tertulis seperti sumber data primer dan sumber data sekunder.

Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti guna mengambil data-data yang diperlukan sebagai bahan dari penelitian. Dalam penentuan lokasi penelitian, (Moleong, 2020:127) menjelaskan bahwa menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan cara menggunakan jalan pertimbangan teori substantif dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan sebenarnya yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di SMP Negeri 5 Situbondo, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:233) ada tiga macam wawancara yang dapat dilakukan antara lain wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. berikut perbedaan ketiganya: 1) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dimana peneliti telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh nantinya. 2) Wawancara semiterstruktur Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. 3) Wawancara tak berstruktur (mendalam) Merupakan wawancara yang bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dalam proses pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam karena peneliti belum mengetahui secara pasti terkait informasi yang akan diperoleh sehingga peneliti akan lebih banyak untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh responden saat melakukan wawancara.

Menurut Basrowi (2018:106) metode observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) Observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian yang melibatkan pengamatan dan penginderaan. Peneliti disini secara langsung melibatkan dirinya untuk berpartisipasi langsung di kehidupan informan. 2) Observasi nonpartisipasi yaitu Metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian yang melibatkan pengamatan dan penginderaan. Namun disini peneliti tidak akan terlibat secara langsung di kehidupan informan. Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipasi karena peneliti tidak terlibat langsung di kehidupan informan. Observasi dilakukan di SMP Negeri 5 Situbondo dan langsung mendatangi tempat tinggal Penerima PIP SMP Negeri 5 Situbondo untuk menambah data yang diperlukan

Dokumentasi digunakan untuk data-data yang berhubungan dengan hal-hal seperti jurnal, transkrip, buku, dan lain sebagainya. studi dokumentasi yang ada pada penelitian ini langsung didapat dari SMP Negeri 5 Situbondo

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program.

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Puslapdik). Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan pendidikan bagi siswa/siswi yang tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya tanpa ada kendala

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2017:244) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaktif karena apabila jawaban yang didapat belum memuaskan maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi. Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa komponen dalam analisis data ini terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahankesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi yaitu cara penyampaian informasi terkait peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengimplementasian Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada penerima bantuan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan maupun sasaran kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus disiapkan dan di lakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai. Peneliti mendeskripsikan dalam 3 aspek yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Transformasi informasi (transmisi)

Dalam proses transformasi informasi dalam Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo. Pada aspek transmisi berkaitan dengan penyebaran informasi yang baik dihasilkan dari komunikasi yang efektif. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu pihak SMP Negeri 5 Situbondo dilakukan dengan sosialisasi langsung dengan mengundang elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pada aspek transmisi berkaitan dengan penyebaran informasi yang baik dihasilkan dari komunikasi yang efektif. Dalam hal ini komunikasi dibangun dengan cara bertemu secara fisik. Dilain sisi komunikasi juga dibangun dengan memanfaatkan Sosial Media. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghindari miskomunikasi baik antar lembaga maupun kelompok pelaksana. Selain itu hal ini dilakukan agar supaya baik pelaksana maupun pekerja dilapangan dapat melaksanakan program sesuai dan sebagaimana yang telah ditetapkan. Sesuai dengan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan posedur yang ada tetapi dalam penyampaian informasinya masih mengalami masalah-masalah, kita tetap melaksanakan implementasi kebijakan ini.

Dimensi kejelasan (*clarity*)

Menghendaki agar kebijakan yang ditansmisikan kepada pelaksana memiliki target, sehingga semua penerima bantuan mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan, sasaran sehingga program PIP berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa komunikasi harus jelas dan tidak ambigu atau membingungkan bagi pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*). Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang terjadi antara pihak SMP Negeri 5 Situbondo dengan penerima bantuan PIP sudah jelas dan tidak membingungkan bagi para pelaksana kebijakan dan penerima bantuan, yang berkaitan dengan alur pencairan PIP akan melalui prosedur yang yang telah berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan semua informan bahwa pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar ini bertujuan untuk mendukung program Wajib Belajar dan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. SMP Negeri 5 Situbondo memberikan kemudahan dan kepastian bagi siswa dan orang tuanya dalam memperoleh bantuan PIP

Dimensi konsistensi (*consistency*)

Menurut Edward III, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah

yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.

Dari hasil penelitian di SMP Negeri 5 Situbondo bahwa sudah adanya proses komunikasi mengenai informasi nama-nama penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Pihak sekolah juga sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa yang mendapatkan program bantuan PIP. Penyampaian informasi sangat penting dalam suatu kebijakan karena harus ada komunikasi yang baik agar program dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga bisa sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal penyampaian informasi terkait nama-nama penerima bantuan PIP kepada siswa masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan dari semua siswa penerima bantuan PIP di sekolah masih ada yang tidak mengetahui namanya ada di daftar penerima PIP. Siswa yang tidak mengetahui namanya ada tersebut baru melakukan pencairan ketika mendekati proses pencairan berikutnya. Selanjutnya yaitu komunikasi terkait pemahaman tentang apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan PIP sudah berhasil melalui proses sosialisasi yang baik dari pihak sekolah dengan orang tua siswa penerima PIP. Orang tua dan siswa menyadari tujuan dan sasaran penggunaan dana PIP.

Sumber Daya

2 Sumber daya mempunyai peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yaitu terkait persiapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo. Adapun sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Indikator sumber daya yang terdapat pada implementasi kebijakan dijabarkan dalam 3 aspek yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas antara lain sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

6 Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya seluruh jajaran harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

Dalam implementasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo sudah mencukupi, yang mana memiliki operator yaitu operator Program Indonesia Pintar, dengan adanya operator program Program Indonesia Pintar pelayanan dalam administrasi bantuan berjalan dengan lancar dan seimbang dalam melayani kebutuhan sekolah serta memiliki background pendidikannya itu sarjana pendidikan, dimana pada awal program diimplementasikan sudah dibekali dengan bimbingan teknis terkait tahapan dan tupoksi yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan yaitu operator program Program Indonesia Pintar sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik

Anggaran

Anggaran merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara bahwa suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran dari PIP didapatkan dari APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara) yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah sesuai dengan aturan yang ada.

Fasilitas

Sarana Prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan diketahui bahwa Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 5 Situbondo dalam melaksanakan Implementasi Program Indonesia Pintar sudah terstruktur dengan baik mulai dari Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Operator PIP, orang tua siswa, dan siswa penerima PIP. Adapun sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan tidak menjadi masalah karena PIP merupakan program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan non manusia terkait Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo sudah berjalan dengan baik, pihak sekolah sudah melaksanakannya dengan maksimal.

Disposisi

Disposisi pada implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar berhubungan dengan komitmen para pelaku atau pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Disposisi disini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga tujuannya dapat terwujud. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting terhadap implementasi kebijakan. Kecenderungan (Disposition) Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana yang mana banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, semua pelaksana Program Indonesia Pintar yang terkait benar-benar memahami dan menerima kebijakan tersebut sehingga mampu melaksanakan implementasi kebijakan

PIP dengan maksimal, dengan memberikan informasi kepada orang tua dan siswa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa disposisi pada Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo sudah berjalan dengan baik dilihat dari bagaimana pihak pelaksana memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal.

Struktur Biokrasi

Struktur Birokrasi menurut George C. Edward III yaitu susunan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo mencakup standar prosedur operasi atau struktur birokrasi itu sendiri yang memiliki peranan penting demi kelancaran Implementasi Program Indonesia Pintar. Terdapat dua macam karakteristik yang dapat menunjang kinerja dari struktur birokrasi agar maksimal yaitu melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP yang jelas harus ada agar kebijakan yang baik dapat dilaksanakan. SOP dalam implementasi program Indonesia pintar sangat diperlukan yang mana nantinya digunakan oleh pelaksana kebijakan sebagai pedoman dalam menjalankan program. Terkait SOP dalam program Indonesia pintar diatur Persesjen Nomor 20 Tahun 2021, bantuan PIP pendidikan dasar dan menengah.

Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa para penerima bantua Program Indonesia Pintar tidak diprioritaskan oleh pihak Bank BRI sehingga mereka tetap harus antri lama bersama para nasabah yang lain. Selain itu juga biasanya terdapat data yang tidak sinkron dari pihak sekolah dan pihak BRI yang menyebabkan penerima harus kembali untuk mengurus datanya. Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo mencakup standar prosedur operasi atau struktur birokrasi itu sendiri yang memiliki peranan penting demi kelancaran Implementasi Program Indonesia Pintar

Fragmentasi

Fragmentasi juga mempengaruhi struktur birokrasi yang merupakan pembagian kerja atau penyebaran tanggung jawab kepada beberapa badan atau pihak berbeda yang melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan tepat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan implementasi yang berkaitan dengan proses pencairan dana, yang mana dalam proses pencairan tersebut melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yaitu pihak sekolah dan pihak penyalur (BRI). Masing-masing pihak memiliki standar operasional yang berbeda sehingga seringkali terjadi keterlambatan penyaluran dana Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan implementasi yang berkaitan dengan proses pencairan dana, yang mana dalam proses pencairan tersebut melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yaitu pihak sekolah dan pihak penyalur (BRI). Masing-masing pihak memiliki standar operasional yang berbeda sehingga seringkali terjadi keterlambatan penyaluran dana Program Indonesia Pintar. Dari hasil wawancara juga ditemukan

bahwa para penerima bantuan Program Indonesia Pintar tidak diprioritaskan oleh pihak Bank BRI sehingga mereka tetap harus antri lama bersama para nasabah yang lain. Selain itu juga biasanya terdapat data yang tidak sinkron dari pihak sekolah dan pihak BRI yang menyebabkan penerima harus kembali untuk mengurus datanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Birokrasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 5 Situbondo belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan melalui wawancara dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa 1) Komunikasi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) jika dilihat dari proses penyampaian informasi terkait nama penerima bantuan PIP masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan dari semua siswa penerima bantuan PIP di sekolah masih ada yang tidak mengetahui namanya ada di daftar penerima PIP. Siswa yang tidak mengetahui namanya ada tersebut baru melakukan pencairan ketika mendekati proses pencairan berikutnya. Tetapi jika dilihat dari proses penyampaian informasi melalui sosialisasi tentang tujuan dan sasaran penggunaan dana PIP sudah berjalan dengan baik. 2) Sumber Daya terkait Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sudah berjalan dengan baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal. hal tersebut sudah terstruktur dengan baik mulai dari Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Operator PIP, orang tua siswa, dan siswa penerima PIP. Adapun sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan tidak menjadi masalah karena PIP merupakan program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. 3) Disposisi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sudah berjalan dengan baik dilihat dari pihak pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal dengan memberikan informasi kepada orang tua dan siswa. 4) Struktur Birokrasi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan cinta kasih yang tiada hentinya dan memberikan dorongan baik moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini sehingga ananda dapat berhasil, semoga keberhasilanku menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kalian. Keluargaku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, motivasi, dan doa darimu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan setia selalu menemaniku meniti masa depan. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Jadi jangan menyerah dan terus berjuang

Ibu Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Usrotul Hasanah, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2018. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta
- Basrowi dan Suwandi, 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2019. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indradi, S. S. 2018. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Lester, J. P., & Stewart, J. 2017. *Public Policy: An Evolving Approach*. Wadsworth.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho D, Riant. 2017. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, CV
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Persejjen Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- Rohaeni, Heni dan Nisa Marwa. 2018. "Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan". *Jurnal Ecodemica*, Vol.2 No.2
- Saryono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suyanto & Sutinah 2018. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Suyanto, Bagong. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tahir, 2020, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab Abdul, Solichin, 2017. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winarno, Budi. 2019. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Zahimu, Hartini. 2018. *Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017*. Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan. 2(1).

Yarlina Yacoub, 2012. "Pengaruh Tingkat Penagngguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Privinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Eksos*, Vol.8, No 3

Subandi, 2012. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Alfabeta

Arsyad, Lincolin. 2018. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN